



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI MANADO

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : DIDIK WURYANTO
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 17334

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 870.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m<sup>2</sup>/110 m<sup>2</sup> di KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1530 m<sup>2</sup>/300 m<sup>2</sup> di KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp. 610.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 626.400.000

1. MOTOR, SUZUKI SMASH SEPEDA MOTOR Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
3. MOBIL, TOYOTA VIOS SEDAN Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 73.000.000
4. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 1900, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
5. MOBIL, TOYOTA /KIJANG INNOVA MINI BUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
6. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
7. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 S MT / MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 205.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 106.750.000

**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 378.083.395

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---



Sub Total	Rp.	1.981.233.395
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.981.233.395

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.